# Laporan Kinerja Tahun 2022

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM



Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

# Kata Pengantar

### Sekretaris Badan P2SDM

"Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban Sekretariat Badan P2SDM terhadap stakeholders atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan P2SDM ini disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor P.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2022.

Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh Sekretariat Badan P2SDM dalam mendukung kinerja organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM selama tahun 2022.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Badan P2SDM dalam memperbaiki kinerjanya, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam menyusun program di masa mendatang, sehingga lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan."

Jakarta, 13 Januari 2023
retaris Badan,
alguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2022 menyajikan keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja oleh Sekretaris Badan P2SDM kepada Kepala Badan P2SDM selam Tahun 2022 serta hal yang perlu diperbaiki. Dalam pencapaian maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran tersebut. Berdasatkan Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan P2SDM Tahun 2022, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diperjanjikan yaitu:

- 1. Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
- 2. Level Maturitas SPIP
- 3. Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK

Hasil pengukuran dari indikator kinerja kegiatan menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Badan P2SDM pada Tahun 2022 sebesar 109,25 dengan capaian pelaksanaan anggaran sebesar Rp21.741.014.445 atau sebesar 99,87% dari pagu anggaran sebesar Rp21.756.466.000. Adapun rasio efektivitas capaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2022 yaitu 1,07 dan rasio efisiensi capaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2022 mempunyai nilai yang sama yaitu sebesar 1. Hal menunjukkan bahwa Sekretariat Badan P2SDM telah efektif dan efisien dalam menggunakan sumberdaya manusia dan anggaran untuk mencapai kinerja.

Meskipun demikian, Sekretariat Badan P2SDM berkomitmen terus menerus menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.

1,00 EFISIEN

Efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat
Badan P2SDM

Nilai Kinerja Sekretariat
Badan P2SDM

99,87%

Realisasi anggaran
Sekretariat BP2SDM

telah memenuhi sasaran
yang dijanjikan



# Capaian Indikator Kinerja Kegiatan







### IKK 1

Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Target : 76

Capaian : 71,75

94,41 %



## IKK 2

Level Maturitas SPIP BP2SDM

Target : Level 3

Capaian : Level 4

133,33%



### IKK 3

Laporan Keuangan Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM yang tertib dan Akuntabel

Target : 1 Dokumen

Capaian: 1 Dokumen

100%





1.1 Latar Belakang

1.2 Struktur Organisasi

1.3 Sumber Daya Manusia

1.4 Sarana Prasarana







# 1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja merupakan penyajian rangkaian aktivitas dalam SAKIP atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi amanah suatu institusi organisasi.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai SAKIP (sistem akuntabilitas instansi pemerintah) yang secara rinci diatur dalam Peraturan MenPAN RB tahun 53 tahun 2014 mengenai petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja memuat ikhtisar kinerja instansi yang meliputi nilai kinerja, realisasi anggaran, dan efisiensi kinerja. Sebagaimana mandat dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 tahun 2021 tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kementerian LHK, Sekretariat Badan P2SDM sebagai unsur Dukungan Manajemen, memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Badan P2SDM. Ruang lingkup fungsi dari instansi ini meliputi beberapa fungsi yaitu:

(1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama, pemantauan, evaluasi, konsultasi publik dan pelaporan kinerja; (2) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, serta hubungan masyarakat;

(3) Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik; (4) Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum; dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga keuangan dan perlengkapan di lingkup Badan.

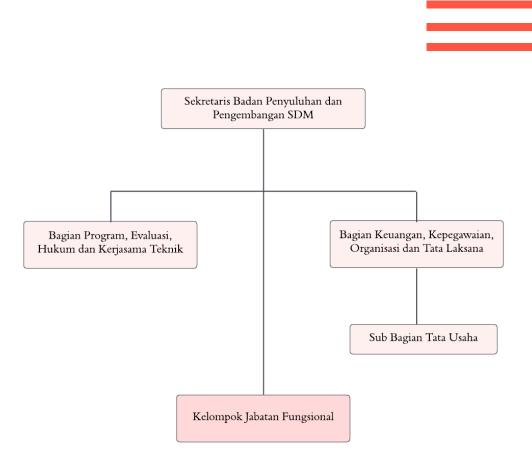
Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Badan P2SDM menjadi garda terdepan dalam berinteraksi dengan para pihak baik internal Badan P2SDM maupun dengan Eselon I lingkup Kementerian LHK maupun Kementerian/Lembaga lain serta masyarakat khususnya dalam hal penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik. Membumikan tugas dan fungsinya dalam kerja sehari-hari secara terukur dan sistematis menjadi modal penting dan tujuan setiap unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal sebagai upaya untuk peningkatan kinerja organisasi.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor P.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan kegiatan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.2 Struktur Organisasi

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 tahun 2021 tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK terdiri atas:

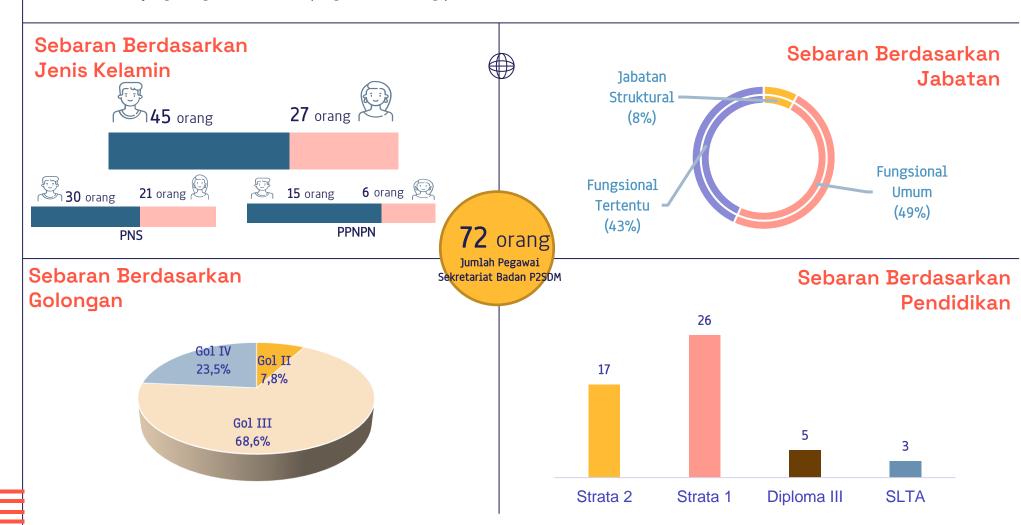
- a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik; Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundangundangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.
- b. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



# 1.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2022 per 31 Desember 2022 sebanyak 72 orang yang terdiri dari 51 orang PNS dan 21 orang PPNPN. Keadaan pegawai PNS Sekretariat Badan P2SDM. Pada Tahun 2022 terdapat 4 orang pegawai Satker Sekretariat Badan P2SDM yang mengalami kenaikan pangkat dan 1 Orang pesiun.

Dengan adanya SOTK terbaru sesuai peraturan P.15/MENLHK-II/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat perubahan dari jabatan es 4 menjadi pejabat fungsional tertentu sebanyak 5 orang.



# 1.4 Sarana Prasarana

Na	]enis Sarana Prasarana	Kon	ndisi	lumlah	Na	Jania Causas Duagasana	Kond	isi	lumlah
No	jenis sarana Prasarana	Baik	Rusak	Jumlah	No	Jenis Sarana Prasarana	Baik	Rusak	Jumlah
1	Јеер	2	-	2	20	Sice	6	1	7
2	Sedan	2	-	2	21	Meja makan kayu	1	-	1
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11	-	11	22	Kursi Fiber Glas/Plastik	65	-	65
4	Sepeda Motor	71	-	71	23	Jam Elektronik	3	-	3
	a. Sekretariat Badan	6	-	6	24	Lemari Es	6	-	6
	b. Kabupaten/Kota (Penyuluh Kehutanan)	65	-	65	25	AC Window	10	1	11
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2	-	2	26	AC Split	6	-	6
6	Mesin Hitung Listrik	1	-	1	27	Kipas Angin	2	2	4
7	Mesin Fotocopy Electronic	1	-	1	28	Televisi	3	3	6
8	Lemari Besi/Metal	18	4	22	29	Sound System	2	-	2
9	Lemari Kayu	29	1	30	30	Camera Video	3	-	3
10	Rak Kayu	-	9	9	31	Dispenser	8	2	10
11	Brandkas	5	-	5	32	Karpet	2	-	2
12	Kardex Besi	13	-	13	33	Gordyn/Kray	3	-	3
13	Lemari Katalog	5	-	5	34	DVD Player	2	-	2
14	White Board	1	2	3	35	Voice Recorder	2	1	3
15	Alat Penghancur Kertas	1	1	2	36	Lensa Kamera	1	-	1
16	Mesin Absensi	3	2	5	37	Alat Pemanas Processing (Water Heater)	2	-	2
17	LCD Projector/Infokus	9	1	10	38	Layar Film Projector	3	-	3
18	Meja Kerja Kayu	77	1	78	39	Pesawat Telephone	5	-	5
19	Kursi Besi/Metal	123	1	124	40	Facsimile	1	1	2

No	Jenis Sarana Prasarana Kondisi Jumla		lumlah	ımlah No Jenis Sarana Prasarana		Kondisi		]umlah	
INU	jeliis Saldiid Flasdidiid	Baik	Rusak	Julitali	INO	jeliis saldiid ridsaldiid	Baik	Rusak	Juilitali
41	Kamera Udara	1	-	1	53	Note Book	-	5	5
42	Lap top	18	10	28	54	P.C Unit	61	3	64
43	CCTV - Camera Control Television System	3	-	3	55	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	10	41
44	Cooling Water Circulator	2	-	2	56	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12	3	15
45	Digital Handycam VHSC	-	1	1	57	Telephone (PABX)	2	-	2
46	Drawing RD	3	-	3	58	Tripod	1	-	1
47	External Floppy Disk Drive	1	-	1	59	Tripod Camera	1	1	2
48	Kamera Digital	-	3	3	60	TV Monitor	1	-	1
49	Meja Kerja Stainless	1	-	1	61	Wireless	2	-	2
50	Meja Rapat	12	-	12	62	Alat Komunikasi Lainnya	3	3	6
51	Meja Resepsionis	2	-	2	63	Lemari Camera	1	-	1
52	Microwave Oven	1	-	1	64	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	2		2



2.1 Rencana Strategis Sekretariat

**Badan P2SDM** 

2.2 Rencana Kerja dan Perjanjian

Kinerja Tahun 2022







## 2.1 Rencana Strategis Sekretariat Badan P2SDM

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2020-2024, diterbitkan melalui Surat Keputusan Sekretariat Badan P2SDM Nomor SK.52/SET/PK/KEU.0/12/2020 tanggal 7 Desember 2020, merupakan instrumen dasar kerangka kerja penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya lingkup Badan P2SDM selama jangka waktu satu periode 5 (lima) tahun secara terarah dan berkesinambungan guna mendukung penyelenggaraan program Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Indikator kinerja kegatan (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai Sekretariat Badan P2SDM dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya lingkup Badan P2SDM dan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM

"Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan P2SDM" Nilai SAKIP Badan
Penyuluhan dan
Pengembangan SDM

Level Maturitas SPIP
BP2SDM

Level Maturitas SPIP
BP

## 2.2 Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Rencana Keria (Renia)/Rencana Keria Tahunan Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2022, ditetapkan melalui Surat Sekretaris Badan Keputusan P2SDM Nomor SK.40/SET/PK/REN.2/12/2021 tanggal 10 Desember 2021, merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, perkiraan pembiayaan kegiatan Dukungan Manaiemen Pelaksanaan lainnya dalam Tugas mendukung penyelenggaraan Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2022.

Pagu anggaran Renja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2022 merupakan pagu indikatif sebagai batas atas belanja dalam penyusunan rancangan/usulan kegiatan sesuai hasil Trilateral Meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Badan P2SDM. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya adalah sebesar Rp21.756.466.000.

Sebagai tindaklanjut dari terbitnya DIPA BA.29 Sekretariat Badan P2SDM TA 2022, telah dilaksanakan Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2022 antara Sekretaris Badan P2SDM dengan Kepala Badan P2SDM pada Bulan Desember 2021. Dengan adanya pergeseran anggaran dan perubahan target capaian pada masing-masing unit kerja Eselon II, maka dilakukan revisi Perjanjian Kinerja antara pejabat Eselon II dan Kepala UPT dengan Kepala Badan P2SDM pada Bulan 20 Desember 2022.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 76 Poin Level Maturitas SPIP BP2SDM Level 3 Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan Akuntabel 1 Dokumen ( SEMULA ) Rp 33.854.252.000 Pagu Anggaran Rp 21.756.466.000 (MENJADI) **Tahun 2022** 



3.1 Reviu atas Dokumen

Perencanaan

3.2 Hasil Pengukuran Capaian







# 3.1 Reviu atas Dokumen Perencanaan

Rencana Kinerja Sekretariat Badan merupakan rencana kegiatan anggaran lingkup Sekretariat Badan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan P2SDM. Alokasi pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan P2SDM pada Satuan Kerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.854.252.000,-. Dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 melalui pencadangan anggaran (Automatic *Adjustment*) sebesar 5% pada setian Kementerian/Lembaga yang dilakukan melalui mekanisme pencantuman blokir anggaran atau catatan halaman IV DIPA. Sepanjang tahun anggaran 2022 terdapat 2 kali kebijakan pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) dan realokasi anggaran yang bersifat mandatori. Pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) dan realokasi anggaran terdapat pada sumber dana Rupiah Murni (RM) baik pada belanja operasional maupun non operasional, yang dilakukan pergeseran anggaran dari BA 029 (Bagian Anggaran Kementerian LHK) ke BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) berupa realokasi anggaran dengan penandaan blokir Automatic Adjustment dalam rangka antisipasi kebutuhan prioritas dan mendesak di akhir tahun 2022.

Selain revisi pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) dan realokasi, juga terdapat revisi antar jenis belanja sumber dana Rupiah Murni (RM) antar KRO/RO pada Program dan Unit Eselon I yang sama yaitu belanja pegawai operasional menjadi selain belanja pegawai operasional berupa belanja barang pada jenis belanja non operasional untuk pemenuhan pembiayaan Pelatihan Dasar bagi Calon PNS lingkup Kementerian LHK. Kemudian terdapat revisi terkait perubahan antar jenis belanja (barang ke modal) untuk kesesuaian akun pada kegiatan Pengembangan aplikasi SIMP2SDM, dan revisi pergeseran anggaran antar Kantor Wilayah DJPb dalam Eselon 1 yang sama sebesar untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai lingkup Kantor Pusat Badan P2SDM.

Pada akhir tahun anggaran, pagu kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan P2SDM pada Sekretariat Badan sebesar Rp21.756.466.000,- atau terdapat penurunan sebesar 35,73% dari pagu awal.

( SEMULA ) Rp 33.854.252.000

Pagu Anggaran Tahun 2022

Rp 21.756.466.000 (MENJADI)

### Kronologis Revisi Anggaran DIPA tahun 2022



#### **DIPA APBN**

Rp 33.854.252.000 17 November 2021



### Revisi ke 1 - DIA

Rp 33.854.252.000 14 Desember 2021 Penandaan Automatic Adjustment sumber dana RM terdiri dari Belania Pegawai dan Belanja Modal



### Revisi ke 2 - D]A

Rp 33.854.252.000 26 Januari 2022 Revisi terkait Buka Blokir dan Penyesuaian RSPP dan Pergeseran antar jenis belanja.



#### Revisi ke 3 - DJA

Rp 33.806.252.000 24 Mei 2022 Revisi terkait Pergeseran antar KRO antar Jenis Belanja dan pergeseran belanja



### Revisi ke 4 - D1A

Rp 33.806.252.000 3 luni 2022 Revisi terkait Penambahan Pencandangan Anggaran (Automatic Adjusment) Tahap ke-2 pada Layanan Dukman Es 1 SubSatker Sekretariat Badan P2SDM



#### Revisi ke 5 - D1A

Rp 33.806.252.000 24 Agustus 2022 Revisi terkait perubahan antar jenis belanja (barang ke modal) untuk kesesuaian akun pada kegiatan Pengembangan aplikasi SIMP2SDM



#### Revisi ke 6 - D1A

Rp 33.323.922.000 1 September 2022 Revisi antar Satker dan antar Jenis Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Latsar CPNS Tahun 2022 di Pusat Diklat SDM LHK



### Revisi ke 7 - D1A

Rp 23.489.192.000 11 Oktober 2022 Revisi pergeseran anggaran dari BA 029 ke BA BUN berupa realokasi belanja pegawai yang berasal dari Blokir Automatic Adjusment



### Revisi ke 8 - Kanwil D1Pb

Rp 23.489.192.000 9 November 2022 Revisi administrasi berupa Pemutakhiran KPA



### Revisi ke 9 - Kanwil D]Pb

Rp 23.489.192.000 16 November 2022 Revisi pergeseran anggaran antar jenis belanja pegawai operasional mejadi selain belanja pegawai operasional



#### Revisi ke 10 - DIT PA

Rp 23.539.192.000 28 November 2022 Revisi pergeseran anggaran antar Kantor Wilayah D]Pb dalam Eselon 1 yang sama untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai lingkup Kantor Pusat Badan P2SDM



#### Revisi ke 11 - DJA

Rp 21.756.466.000 30 November 2022 Revisi pergeseran anggaran dari BA 029 ke BA BUN berupa realokasi belanja yang berasal dari Blokir Automatic Adiusment



### Revisi ke 12 - Kanwil D1Pb

Rp 21.756.466.000 8 Desember 2022 Revisi administrasi berupa Pemutakhiran KPA



### Revisi ke 13 - Kanwil DJPb

Rp 21.756.466.000 26 Desember 2022 Revisi administrasi berupa Pemutakhiran KPA



# 3.2 Hasil pengukuran Capaian

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja			
Dukungan Manajemen	Nilai SAKIP Badan P2SDM	76	71,75	94,41			
dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Level Maturitas SPIP BP2SDM	Level 3	Level 4	133,33			
Lainnya pada Badan P2SDM	Laporan Keuangan Badan P2SDM yang tertib dan Akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Rata-rata capaian Kinerja						

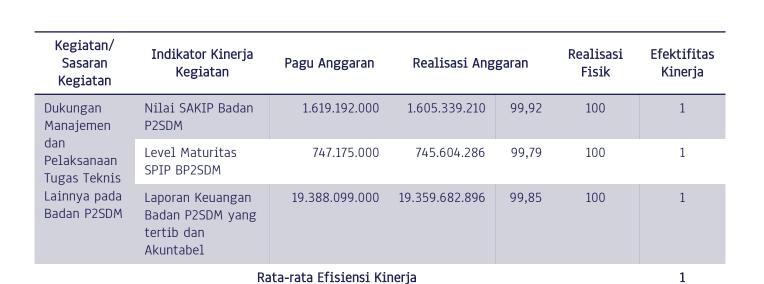
Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Efektifitas Kinerja		
Dukungan Manajemen	Nilai SAKIP Badan P2SDM	80,82	71,75	0,89		
dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Level Maturitas SPIP BP2SDM	Level 3	Level 4	1,33		
Lainnya pada Badan P2SDM	Laporan Keuangan Badan P2SDM yang tertib dan Akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	1		
	Rata-rata Efektivitas Kinerja					

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan capaian rencana dan/atau keberhasilan capaian kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran.

Rata-rata capaian kinerja Satker Sekretariat Badan P2SDM sebesar 109,25%, yang berarti bahwa Sekretariat Badan P2SDM telah berhasil dalam mencapai target yang telah diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Rata-rata nilai efisiensi kinerja Sekretariat Badan P2SDM termasuk dalam kategori efisien (nilai rasio efisiensi ≥ 1). Hal ini berarti Sekretariat Badan P2SDM telah efisien dalam menggunakan anggaran untuk mencapai target kinerja.

# Hasil pengukuran Capaian



# INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

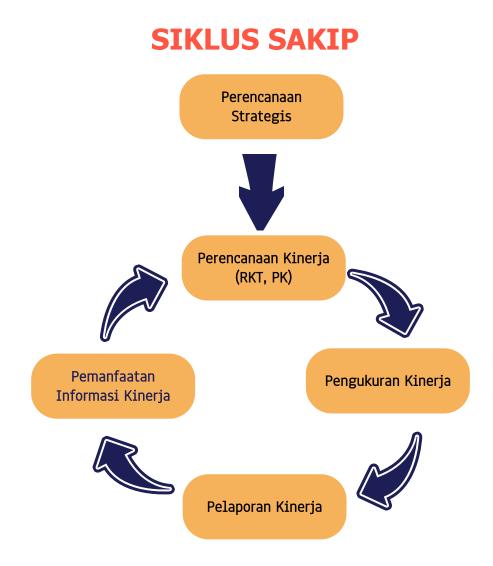
Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM



# **SAKIP** (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kkinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Evaluasi terhadap SAKIP dilaksanakan setiap tahun guna menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas outcome program terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya good governance yang berorientasi hasil. Dalam peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 tahun 2021, komponen yang diukur dalam evaluasi SAKIP meliputi Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (25%).



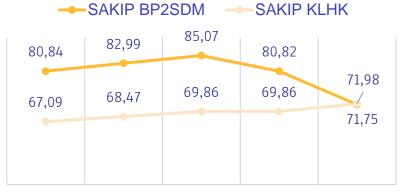
### Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Evaluasi atas penerapan SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jendral KLHK untuk mengukur sejauh mana implementasi SAKIP Badan P2SDM. Evaluasi dilaksanakan pada Bulan April 2022 dengan hasil diperoleh sebesar 71,75 poin dari target 76 poin (94,91%). Berdasarkan evaluasi pada setiap komponen, pelaporan kinerja merupakan komponen dengan presentase nilai paling tinggi dibandingkan bobotnya yaitu sebesar 83,33%. Sedangkan komponen evaluasi internal memperoleh presentase nilai paling rendah yaitu 63,00%.

Perkembangan nilai SAKIP Badan P2SDM sejak tahun 2018-2021 mengalami peningkatan sedangkan sejak tahun 2021-2022 mengalami trend penurunan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian pada tahun 2022 menurun pada komponen perencanaan sebesar 12,14%, pengukuran kinerja sebesar 12,02% dan evaluasi internal sebesar 24%. Sedangkan pada komponen pelaporan kinerja mengalami peningkatan 1,66%. Penurunan ini disebabkan karena pada Penilaian SAKIP pada Tahun 2022 menggunakan Instrumen yang baru yaitu Peraturan Menteri PAN RB nomor 88 Tahun 2021 sehingga terdapat beberapa dokumen/kelengkapan baru yang diperlukan. Badan P2SDM akan melakukan perbaikan dengan menyisir dan mempersiapkan seluruh dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penilaian Tahun selanjutnya.



Komponen	Bobot	Nilai	%
Perencanaan Kinerja	30	23,21	77,36%
Pengukuran Kinerja	30	21,38	71,26%
Pelaporan Kinerja	15	12,15	83,33%
Evaluasi Internal	25	15,00	60,00%
Total		71.75	Poin



Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

## Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP

Rekomendasi 1	Pengesahan dokumen secara formal (Renstra, Renja, Rencana Aksi) mencantumkan keterangan waktu (tanggal) pengesahan secara detail
Rekomendasi 2	dalam penyusunan IKP memenuhi kriteria SMART ( <i>Spesific, Measureable, Achievable, Relevance and Timebound</i> ) terutama untuk kriteria <i>Measureable</i> dan <i>Timebound</i>
Rekomendasi 3	target capaian kinerja selaras antara dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja dan target yang dicanangkan dalam IKK jumlahnya sesuai Renstra
Rekomendasi 4	Dokumen perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dengan (Crosscutting) dan memuat penjelasan tentang program yang didukung oleh Eselon I lainnya.
Rekomendasi 5	Rencana Kinerja setiap tahunnya dipublikasikan pada homepage resmi unit kerja
Rekomendasi 6	tujuan yang tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja (Renstra) unit Kerja (salah satunya pada Pusdiklat SDM LHK) menggambarkan kondisi kinerja yang ingin dicapai
Rekomendasi 7	Pengukuran Indikator Kinerja tiap IKP dijelaskan secara rinci, termasuk penentuan definisi operasional yang jelas
Rekomendasi 8	memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dan sebagai dasar penyesuaian tunjangan kinerja serta dasar penempatan jabatan
Rekomendasi 9	Dokumen Laporan Kinerja Tahunan dipublikasikan pada homepage unit kerja
Rekomendasi 10	dalam laporan kinerja memuat informasi perbandingan realisasi kinerja tahunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
Rekomendasi 11	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh satker lingkup BP2SDM (termasuk satker pusat dan daerah/unit pelaksana teknis) dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait penggunaan aplikasi dalam melakukan Evaluasi AKIP Internal secara mandiri.

### Upaya Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK

Untuk menjawab rekomendasi dari inspektorat jenderal KLHK, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan SAKIP Badan P2SDM diantaranya:



- Badan P2SDM telah menambahkan kriteria pegawai yang berkinerja dan tidak berkinerja pada Renja Tahun 2021
- Pada SOP pengumpulan data kinerja telah ditambahkan poin no 4 yaitu "Berdasarkan hasil penelaahan, jika terdapat data yang salah, maka sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan akan mengkonfirmasi kepada wali data Satker yang bersangkutan untuk memperbaikinya"
- Pada Laporan Kinerja Tahun 2022 telah membandingkan capaian dengan Target RPJMN sebagai standar nasional.
- Badan P2SDM telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan SAKIP yang diikuti oleh Seluruh Satker lingkup Badan P2SDM dan telah dilakukan penilaian mandiri SAKIP oleh Satker lingkup Badan P2SDM.

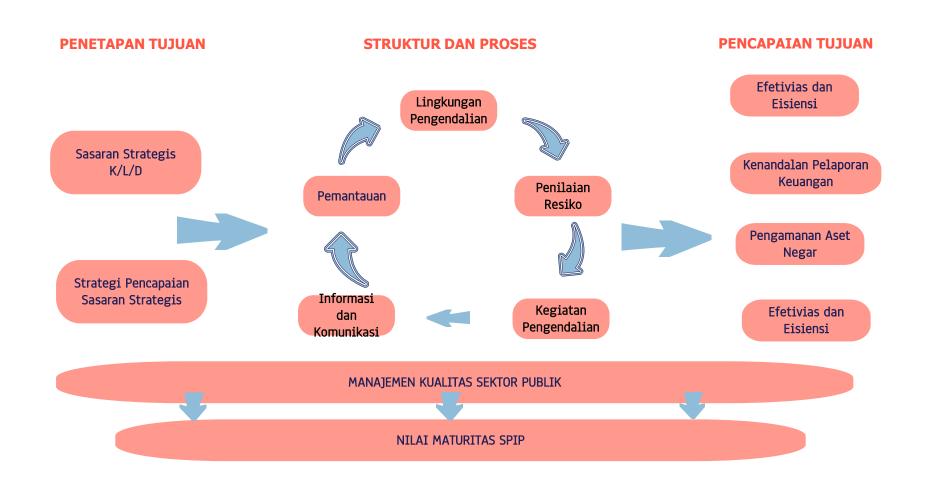
- Pada Laporan Evaluasi Renja/Renstra telah ditambahkan bab yang membuat simpulan dan rekomendasi.
- 7 Telah dilakukan survei persepsi upaya pemberantasan korupsi di lingkup Badan P2SDM sebagaimana data pada lampiran 10.
- Telah dilakukan survei persepsi upaya pemberantasan korupsi di lingkup Badan P2SDM sebagaimana data pada lampiran 10.
- 9 Telah dilakukan survei persepsi upaya pemberantasan korupsi di lingkup Badan P2SDM sebagaimana data pada lampiran 10.
- Telah dilakukan survei persepsi upaya pemberantasan korupsi di lingkup Badan P2SDM sebagaimana data pada lampiran 10.
- Telah dilakukan survei persepsi upaya pemberantasan korupsi di lingkup Badan P2SDM sebagaimana data pada lampiran 10.

# INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

Level Maturitas SPIP BP2SDM



# Framework Penilaian Penyelenggaraan SPIP



# Level Maturitas SPIP Badan P2SDM

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern di sebuah instansi.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP didasarkan pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 7 April 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Adapun objek penilaian Maturitas SPIP dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen yaitu:

- 1. Komponen Penetapan Tujuan (bobot 40% dengan skor 2)

  Komponen ini menilai mengenai kualitas perencanaan sebuah organisasi dengan melihat sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran startegis organisasi.
- 2. Komponen Struktur dan Proses (30% dengan skor 1,5)

  Komponen ini menilai struktur dan proses dari unsur SPIP yang tercermin dari 5 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.
- 3. Komponen Pencapaian Tujuan SPIP (30% dengan skor 1,5)

  Komponen ini menilai capaian dari 4 tujuan penyelenggaraan SPIP organisasi yang meliputi efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

# Capaian Maturitas SPIP Badan P2SDM

Nilai Maturitas SPIP Badan P2SDM diperoleh dari hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri (PMM) SPIP Badan P2SDM yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Dari ekspos hasil penjaminan kualitas terhadap Penilaian Mandiri Matutitas SPIP Eselon I Lingkup Kementerian LHK, Badan P2SDM memperoleh nilai sebesar 4,2 yang menunjukkan bahwa tingkat Maturitas SPIP Badan P2SDM sudah dalam kategori terkelola dan terukur (Level 4).

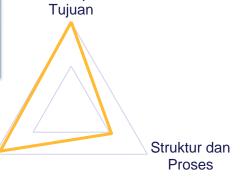
Hasil ini telah melebihi target yang ditetapkan (level 3) sehingga capainnya sebesar 133,33%. Level 4 ini menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Adapun rincian nilai penjaminan kualitas PMM Maturitas SPIP Badan P2SDM adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	SKOR		
1	PENETAPAN TUJUAN	2		
2	STRUKTUR DAN PROSES	0,8		
3	PENCAPAIAN TUJUAN	1,4		
	TOTAL BOBOT			

Pencapaian

Tujuan

Source : bit.ly/SPIP2022-KLHK



Penetapan

Meskipun capaian telah melebihi target yang ditentukan, masih terdapat komponen yang masih cukup rendah sekali capaiannya yaitu pada komponen Struktur dan Proses yang masih mencapai skor 0,8.

Dari hasil tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang menjadi perhatian untuk peningkatan Maturitas SPIP Badan P2SDM yaitu:

- Memperbaiki penepatan indikator dan target kerja sasaran program sehingga menggambarkan kondisi sasaran program yang akan dicapai dan mendukung pencapaian target indicator perencanaan diatasnya;
- 2. Memperbaiki penyajian bukti pendukung penilaian maturitas dari segi kelengkapan, kesesuaian dengan periode penilaian mandiri dan kesesuaian dengan Teknik/langkah kerja yang digunakan dalam penilaian maturitas;
- 3. Menetapkan kebijakan terkait manajemen resiko;
- 4. Membuat program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko pada operasional dan strategis unit kerja serta strategis K/L, dengan tujuan untuk membentuk SDM yang berkompeten dalam bidang manajemen risko sebagai anggota Unit Pengelola Risko (UPR);
- 5. Membentuk Unit Pengelola Risiko (UPR) pada tingkat operasional dan strategis unit kerja serta strategis lingkup K/L;
- 6. Menyusun rencana aksi peningkatan nilai SPIP sesuai hasil penilaian, Area of Improvement, dan rekomendasi perbaikannya dengan timeline yang jelas dan rinci;
- 7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PM Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi pada masing-masing unit kerja lingkup Kementerian LHK

# Capaian Maturitas SPIP Badan P2SDM

Jika dilihat dari capaian hasil penjaminan kualitas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP lingkup Kementerian LHK, nilai Maturitas SPIP tertinggi dicapai oleh Direktorat Jenderal PSKL dan Badan P2SDM di posisi ke-2 bersama dengan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal PKTL. Nilai Hasil penjaminan kualitas Maturitas SPIP lingkup Kementerian LHK selengkapnya sebagaimana berikut:

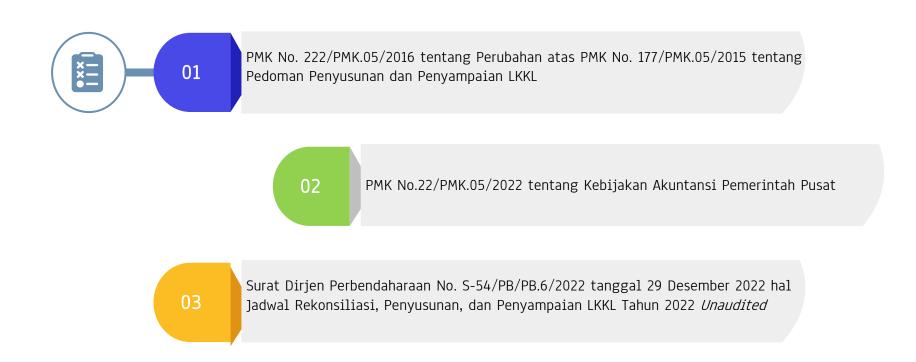
NO	UNIT KERJA ESELON I	NILAI PMM SPIP
1	Sekretariat Jenderal	3,8
2	Inspektorat Jenderal	4,2
3	Direktorat Jenderal PHL	3,9
4	Direktorat Jenderal PKTL	4,2
5	Direktorat Jenderal KSDAE	3,9
6	Direktorat Jenderal PDASRH	3,7
7	Badan P2SDM	4,2
8	Badan Standardisadi dan Instrumen	3,9
9	Direktorat Jenderal PSKL	4,3
10	Direktorat Jenderal PPI	3,8
11	Direktorat Jenderal PHLHK	3,9
12	Direktorat Jenderal PSLB3	3,7
13	Direktorat Jenderal PPKL	3,9
14	Badan RGM	3,8

# INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

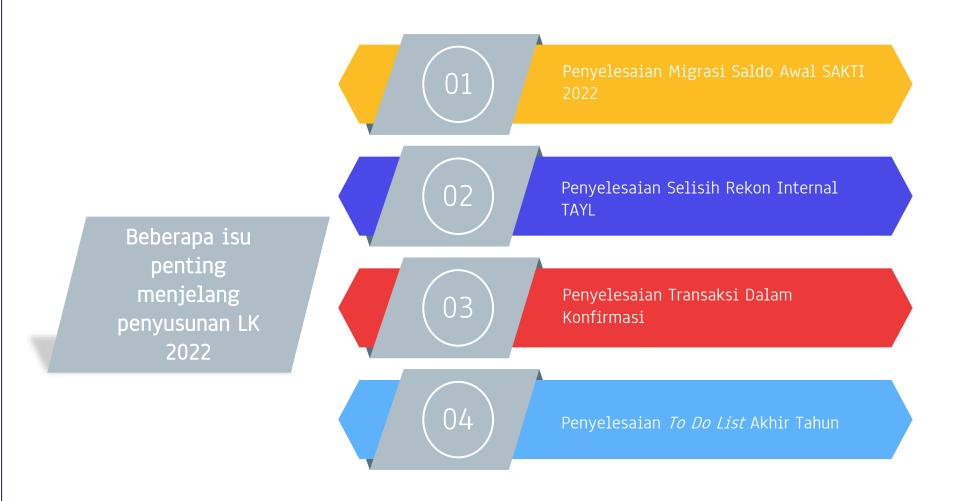
Laporan Keuangan Badan P2SDM yang tertib dan Akuntabel



# Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022



# Current Issues LK 2022



# Migrasi Saldo Awal SAKTI





# PMK No. 1Z71/PMK.05/2021 ttg Pelaksanaan Sistem SAKTI

 Migrasi data saldo awal SAKTI dilaksanakan pada saat penggunaan Modul Persed, Modul AT, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan untuk pertama kali



Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-142/PB/2022 tgl 14 Juni 2022 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Migrasi Data Modul Pelaporan SAKTI (Modul Persed, Modul AT, Modul GLP)

- Migrasi data saldo awal SAKTI dilaksanakan sebelum Kelompok Modul Pelaporan digunakan oleh Satker untuk pertama kali
- Proses migrasi data baru dapat dilakukan setelah penetapan Laporan Keuangan (LK) *Audited* TA 2021

# Penyelesaian Selisih Rekon Internal TAYL

### Selisih Rekon Internal

Selisih rekon internal pada LK 2021 *Audited* diselesaikan di SAKTI Th 2022

### Kebijakan Penyelesaian 🔣



- S-40/PB/PB.6/2022 Penyusunan dan Penyampaian LKKL Triwulan III Th 2022
- Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2022 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian LKKL Tahun 2022 Unaudited



### **Progress** Penyelesaian

- Eselon I telah melakukan identifikasi atas selisih rekon internal TAYL
- ✓ Penyelesaian selisih dilakukan secara terpusat oleh Kemenkeu (d.h.i. D]Pb)
- Dilakukan penambahan validasi di SAKTI untuk mencegah selisih rekon internal

### Penyusunan dan Penyampaian LK

1

LKKL Tahun 2022 (*Unaudited*) dihasilkan melalui data **Aplikasi SAKTI** dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan 31 Desember 2022

Memperhatikan batas waktu penyampaian LK Tahun 2022 (*Unaudited*) untuk setiap jenjang Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan12 4

2

Memastikan seluruh satker di lingkupnya telah menyelesaikan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan KPPN untuk periode Desember 2022 sampai dengan terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

Memastikan lembar muka/face setiap komponen LKKL Tahun 2022 (*Unaudited*) telah ditandatangani oleh **Pengguna Anggaran**  5

3

Memastikan seluruh satker (termasuk subsatker) telah melakukan tutup buku Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap, serta **tutup permanen** Modul GLP sampai dengan periode Desember 2022 (Periode 12 dan 13)

Memastikan LK Tahun 2022 (*Unaudited*) telah disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari **Pengguna Anggaran** serta Pernyataan Telah Direviu 6

# Strategi Peningkatan kualitas LK



Penerapan
Pengendalian
Internal atas
Pelaporan
Keuangan (PIPK)



Digitalisasi dokumen sumber

SI-AKLAP (Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan)



Optimalisasi peranan APIP

## Tantangan Penyusunan Laporan Keuangan 2022



### Perubahan Sistem

- Implementasi SAKTI dan MonSAKTI
- Perubahan Pola Kerja
- Penyesuaian Proses Bisnis

- a. Update Kebijakan Penyusunan LKKL dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan;
- b. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun Anggaran dan *Update* Peraturan mengenai Sistem Akuntansi;
- c. Update Kebijakan Penatausahaan BMN; dan

### Tindak Lanjut LHP BPK

Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

- Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
- Optimalisasi Fungsi Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

### Permasalahan yang Harus Diselesaikan

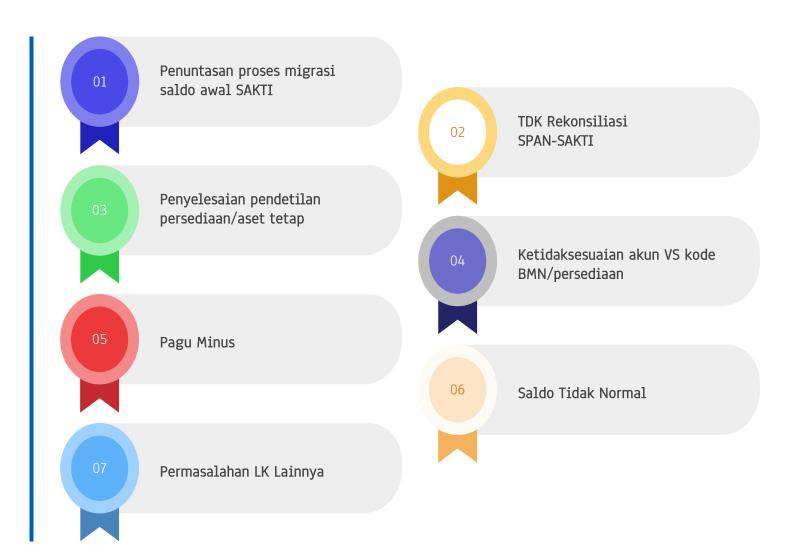


### Monitoring Migrasi

• *Rollout* Migrasi

### Monitoring Kualitas Data

- To Do List
- Monitoring
- Rekonsiliasi
- Daftar/Rincian





- 1. Laporan Kinerja Tahun 2021 menjadi feedback dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2022 sehingga capaian di Tahun 2022 secara umum dapat meningkatkan beberapa capaian di sekretariat Badan P2SDM seperti IKK 2 Level Maturitas BP2SDM yang mencapai 133,33%, IKK 3 Laporan Keuangan BP2SDM yang Handal dan Akuntabel sudah sesuai dengan yang ditargetkan, serta capaian realisasi anggaran Sekretariat Badan P2SDM yang meningkat sebesar ....... dari tahun 2021. Meskipun masih ada satu capaian IKK yaitu nilai SAKIP yang hanya mencapai 94,41% dari target yang sudah dicanangkan di Tahun 2022 karena adanya adaptasi terhadap peraturan penilaian yang baru.
- 2. Selanjutnya, agar Laporan kinerja ini dapat bermanfaat di tahun 2023, maka Sekretariat Badan P2SDM akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Berusaha mempertahankan dan meningkatkan capaiannya terutama capaian IKK 1 Nilai SAKIP Badan P2SDM dengan meningkatkan pemahaman mengenai tata cara penilaian SAKIP serta kelengkapan dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan peraturan yang baru melalui bimtek dan asistensi ke satker lingkup Badan P2SDM.
  - b. b. Sekretariat Badan akan lebih intensif dalam mengawal revisi Halaman III DIPA untuk keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan dan mendukung peningkatan nilai IKPA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: A. Palguna Ruteka

Jabatan

: Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Ir. Helmi Basalamah, MM

Jabatan

: Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pinak Kedua.

Ir. Helmi Basalamah, MM NIP. 19611119 198802 1 001 Jakarta.

17 November 2021

Pihak Pertama.

A. Palguna Ruteka NIP. 19650924 199303 1 00

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	76 Poin	

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Anggaran

Rp36.826.809.000,-

Jakarta,

17 November 2021

Pihak Pertama,

A. Palguna Ruteka

NIP. 19650924 199303 1001

Pihak Kedua,

Ir. Helmi Basalamah, MM NIP. 19611119 198802 1 001

### TARGET TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	76 Poin	-	76 Poin	76 Poin	76 Poin

### Catatan:

BO3 : Target Komulatif Triwulan I; B06 : Target Komulatif Triwulan II; B09 : Target Komulatif Triwulan III; B12 : Target Komulatif Triwulan IV

Jakarta,

17 November 2021

A. Palguna Ruteka NIP. 19650924 199303 1 001



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (REVISI)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. A. Palguna Ruteka

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. A. Palguna Ruteka

Jabatan : Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. A. Palguna Ruteka NIP. 19650924 199303 1 001 Jakarta, 20 Desember 2022

Pihak Pertama,

Drs. A. Palguna Ruteka NIP. 19650924 199303 1 001

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (REVISI) SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
140.	Casaran Regiatan	mulkator Killerja Kegiatan	Semula	Menjadi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi	Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan	76 Poin	76 Poin	
	dan layanan publik yang agile,	Pengembangan SDM			
	efektif, dan efisien lingkup	Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan	Level 3	Level 3	
	Badan Penyuluhan dan	Pengembangan SDM			
	Pengembangan SDM	Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pengembangan SDM yang Tertib dan Akuntabel			

### Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Anggaran (Rp)

Semula 33.806.252.000

Menjadi

23.489.192.000

Pihak Kedua,

Drs. A. Palguna Ruteka NIP. 19650924 199303 1 001 Jakarta, <sup>20</sup> Desember 2022 **Pihak Pertama**,

Drs. A. Palguna Ruteka NIP. 19650924 199303 1 001

# TARGET TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (REVISI) SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Penyuluhan dan Pengembangan SDM	76 Poin		76 Poin	76 Poin	76 Poin
		Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3
		Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang Tertib dan Akuntabel	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

### Catatan:

B03 : Target Komulatif Triwulan I; B06 : Target Komulatif Triwulan II; B09 : Target Komulatif Triwulan III; B12 : Target Komulatif Triwulan IV

Jakarta, 20 Desember 2022

Drs. A. Palguna Ruteka NIP. 19650924 199303 1 001